

**DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL
TERHADAP IKLIM USAHA UMKM
(Studi Kasus Pemotongan Subsidi BBM)**

Rapma Siahaan^{*}

Abstrak

Kenaikan harga BBM sebesar 28,7 % diprediksikan akan berdampak pada peningkatan nilai produksi usaha mikro 8,4 %, usaha kecil 7,1 % dan usaha menengah 15%. Tetapi kenaikan harga BBM tersebut berakibat pada kenaikan biaya produksi UMKM. biaya produksi usaha mikro 34%, usaha kecil 24,6% dan usaha menengah 129,6 %. Akibatnya usaha mikro menderita kerugian 20,56% , usaha kecil 21,8 % dan usaha menengah 12,2 %. Kenaikan harga BBM juga telah menyebabkan menurunnya penyerapan tenaga kerja oleh usaha mikro sebesar 1,5 %, usaha kecil 3,2 % dan usaha menengah 2,5 %. Untuk mengantisipasi menurunnya kualitas dan kuantitas keberhasilan program pemberdayaan UKM, idealnya memang perlu dipikirkan solusi penggunaan dana hasil pemotongan subsidi BBM, untuk mendukung program-program perkuatan UMKM dan Koperasi. Beberapa langkah kebijakan pemerintah seperti BLT, Raskin dan Askeskin tidak akan berperan dalam mengatasi masalah yang dihadapi UMKM sedangkan efektifitas Program KUR, dan PNPM-Mandiri masih perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena sekarang ini belum ada program-program yang dapat menjamin peningkatan upaya pemberdayaan khususnya untuk dapat mengatasi dampak kenaikan harga BBM maka diperlukan adanya solusi dalam bentuk konsep kebijakan pemerintah. Salah satu solusi tersebut dengan mengembangkan program perkuatan UMKM dalam banyak hal dapat mengindikasikan kemampuannya untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan pendapatan UMKM.

*Harga BBM, naik, dampak, solusi, kebijakan,
pemberdayaan,perkuatan UMKM*

I. Pendahuluan

Salah satu kebijakan fiskal yang sangat menggemparkan di awal tahun 2008 adalah dinaikkannya harga BBM dalam negeri sebagai dampak dari kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM di pasaran internasional

^{*} Peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM

yang pada awal bulan Mei 2008 telah mencapai US \$ 132 per barel secara langsung mempengaruhi beban subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah. Dengan asumsi harga minyak dunia sebesar US\$ 95 per barel saja APBN 2008, dibayang-bayangi oleh devisa anggaran antara 2,5 sampai dengan 4 %. Berdasarkan perkiraan harga minyak dunia 110 US\$ per barel, subsidi yang menjadi beban APBN-P 2008, mencapai Rp 260 Triliun. Untuk mengamankan APBN-P 2008 Pemerintah mengurangi subsidi lebih kurang 28,7 %. Pengurangan Subsidi BBM tersebut secara langsung berdampak pada kenaikan rata-rata biaya produksi UMKM

Tabel 1 di bawah ini memperlihatkan kenaikan harga BBM selama tahun 2002 sampai dengan tahun 2008.

**Tabel 1. Kenaikan Harga BBM
Antara Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2008**

Jenis BBM	Tahun			
	2002	2003	2005	2008
Bensin Premium	1.750	2.400	4.500	6.000
Minyak Solar	1.440	2100	4.300	5.500
Minyak Tanah	700	700	2.000	2.500
Harga Rata-Rata	1.297	1.733	3.600	4.667
Kenaikan		33,61 %	107,73 %	29,64 %

Sumber : Suarja dan Syarif (2008) *Nasib UMKM di bawah Bayang-Bayang Kenaikan Harga BBM*

Keterangan : Rata-rata kenaikan dihitung secara agregat tanpa memperhitungan Volume penyediaan dari tiap jenis BBM

Mengurangi subsidi BBM memang merupakan salah satu solusi yang harus diambil, tetapi dengan memperhatikan kondisi UMKM sekarang ini yang dihadapkan pada berbagai masalah, maka untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan harga BBM tersebut idealnya pemerintah juga dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat mengurangi kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh UMKM.

II. Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap UMKM

Biro pusat Statistik (BPS) tahun 2007 yang lalu menginformasikan bahwa kenaikan harga BBM pada tahun 2005 telah berdampak langsung terhadap nilai jual produk usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah seperti diperlihatkan pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Dampak Kenaikan Harga BBM Terhadap Nilai Produksi (Omset) UMKM (Per bulan)

Kelompok UMKM	Nilai Produksi				
	2003 (Rp 000)	2005 (Rp 000)	Kenaikan (%)	Prediksi 2008	
				% kenaikan	Nilai (Rp000)
Mikro	3.126	3.389	8,41	2,24	3.464,91
Kecil	18.582	19.906	7,13	1,90	20.284
Menengah	162.842	188.491	15,75	4,19	196.389
UMKM	11.534	12.755	10,60	2,82	13.115

Sumber : Suarja dan Syarif (2008) Nasib UMKM di bawah Bayang-Bayang Kenaikan Harga BBM

Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai produksi usaha mikro naik sebesar 8,4 %, usaha kecil naik 7,1 % dan usaha menengah naik 15 %. Tetapi kenaikan harga BBM tersebut juga berakibat pada kenaikan biaya produksi UMKM. Tabel 3 di bawah ini memperlihatkan biaya produksi usaha mikro meningkat 34 %, biaya produksi pengusaha kecil meningkat sebesar 24,6 % dan biaya produksi pengusaha menengah naik sebesar 129,6 %.

Tabel 3. Dampak Kenaikan Harga BBM Terhadap Biaya Produksi UMKM (Per bulan)

Kelompok UMKM	Biaya Produksi				
	2003 (Rp 000)	2005 (Rp 000)	Kenaikan (%)	Prediksi 2008	
				% kenaikan	Nilai (Rp000)
Mikro	1.660	2.224	33,98	9,03	2.430,83
Kecil	11.597	14.445	24,55	6,52	15.386
Menengah	108.987	141.215	29,75	7,91	152.385
UMKM	7.189	9.208	28,09	7,47	9.895

Sumber : Suarja dan Syarif (2008) Nasib UMKM di bawah Bayang-Bayang Kenaikan Harga BBM

Dengan membandingkan kenaikan nilai produksi pada tabel 2 dan kenaikan biaya pada tabel 3 di atas, tabel 4 dibawah ini memperlihatkan bahwa usaha mikro menderita kerugian sebesar 18,4 %, usaha kecil rugi 21,8 % dan usaha menengah rugi 12,2 %. Kenaikan harga BBM juga telah menyebabkan menurunnya penyerapan tenaga kerja oleh usaha mikro sebesar 1,5 %, usaha kecil 3,2 % dan usaha menengah 2,5 %

Tabel 4. Dampak Kenaikan Harga BBM Terhadap Laba (Keuntungan) UMKM (Per Bulan)

Kelompok UMKM	Laba/Rugi				
	2003 (Rp 000)	2005 (Rp 000)	Kenaikan (%)	Prediksi 2008	
				% kenaikan	Nilai (Rp000)
Mikro	1.466	1.164	-20,56	- 5,47	1.100
Kecil	6.984	5.461	- 21,81	- 5,80	5.144
Menengah	53,855	47.276	- 12,22	- 3,25	45.740
UMKM	4.346	3.547	- 18,37	- 4,89	3.374

Sumber : Suarja dan Syarif (2008) *Nasib UMKM di bawah Bayang-Bayang Kenaikan Harga BBM*

Lebih lanjut tabel 5 di bawah ini memperlihatkan bahwa kenaikan harga BBM juga berdampak pada kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga yang menurun rata- rata 2,45 %.

Tabel 5. Dampak Kenaikan Harga BBM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Oleh UMKM

Kelompok UMKM	Biaya Produksi				
	2003 (Orang)	2005 (Orang)	Kenaikan (%)	Prediksi 2008	
				% kenaikan	(Orang)
Mikro	1,96	1,93	-1,5	- 0,34	1,92
Kecil	5,85	5,66	- 3,23	- 0,86	5,61
Menengah	21,08	20,56	- 2,48	-0,66	20,42
UMKM	3,52	3,43	-2,45	- 0,65	3,40

Sumber : Suarja dan Syarif (2008) *Nasib UMKM di bawah Bayang-Bayang Kenaikan Harga BBM*

III. Prediksi Dampak Kenaikan harga BBM tahun 2008 terhadap UMKM

Dari tabel 2 sampai dengan tabel 5, dengan menggunakan metoda ekstrapolasi dapat diprediksi dampak kenaikan harga BBM terhadap keragaan usaha UMKM adalah sebagai berikut:

3.1. Prediksi Dampak kenaikan harga BBM terhadap nilai jual produk UMKM

Dari tabel 2 terlihat bahwa nilai produksi usaha mikro naik sebesar 8,4 %, usaha kecil naik 7,1 % dan usaha menengah naik 15 %. Tetapi

kenaikan harga BBM tersebut juga berakibat pada kenaikan biaya produksi UMKM. Tabel 3 di atas memperlihatkan biaya produksi usaha mikro meningkat 34 %, biaya produksi pengusaha kecil meningkat sebesar 24,6 % dan biaya produksi pengusaha menengah naik sebesar 129,6 %.

3.2. Prediksi dampak Kenaikan harga BBM terhadap Biaya produksi

Dengan membandingkan kenaikan nilai produksi pada tabel 2 dan kenaikan biaya pada tabel 3 di atas, tabel memperlihatkan bahwa usaha mikro menderita kerugian sebesar 18,4 % , usaha kecil rugi 21,8 % dan usaha menengah rugi 12,2 %. Kenaikan harga BBM juga telah menyebabkan menurunnya penyerapan tenaga kerja oleh usaha mikro sebesar 1,5 %, usaha kecil 3,2 % dan usaha menengah 2,5 %

3.3. Prediksi dampak kenaikan harga BBM terhadap Laba UMKM

Dengan membandingkan kenaikan nilai produksi pada tabel 2 dan kenaikan biaya pada tabel 3 di atas, tabel 4 memperlihatkan bahwa usaha mikro menderita kerugian sebesar 20,56 %, usaha kecil rugi 21,8 % dan usaha menengah rugi 12,2 %. Kenaikan harga BBM juga telah menyebabkan menurunnya penyerapan tenaga kerja oleh usaha mikro sebesar 1,5 %, usaha kecil 3,2 % dan usaha menengah 2,5 %

3.4. Prediksi Dampak Kenaikan harga BBM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Dengan membandingkan kenaikan nilai produksi pada tabel 2 dan kenaikan biaya pada tabel 3 di atas, tabel 4 memperlihatkan bahwa usaha mikro menderita kerugian sebesar 20,50 % , usaha kecil rugi 21,8 % dan usaha menengah rugi 12,2 %. Kenaikan harga BBM juga telah menyebabkan menurunnya penyerapan tenaga kerja oleh usaha mikro sebesar 1,5 %, usaha kecil 3,2 % dan usaha menengah 2,5 %

Untuk mengantisipasi menurunnya kualitas dan kuantitas keberhasilan program pemberdayaan UKM, idealnya memang perlu dipikirkan solusi penggunaan dana hasil pemotongan subsidi BBM, untuk mendukung program-program perkuatan UMKM dan Koperasi, khususnya usaha mikro. Beberapa langkah kebijakan memang telah diambil pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut seperti dengan mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan penambahan jaminan KUR sebesar 1,4 Triliun.

Hasil pengamatan BPS pada waktu kenaikan harga BBM tahun 2005 yang lalu mencatat bahwa untuk mengatasi kenaikan biaya produksi para pengusaha UMKM mengambil beberapa alternatif antara lain:

1. 45,39% mengurangi ukuran/kuantitas barang;
2. 7,12 % mengurangi kualitas barang;
3. 63,66% mengurangi keuntungan;
4. 39,70 % melakukan efisiensi usaha;
5. 6,11 % melakukan usaha lainnya.

IV. Kebijakan Penanggulangan Dampak Subsidi BBM

Sebagian besar pengusaha mikro termasuk dalam kelompok masyarakat miskin dengan pendapatan kurang dari 1 (satu) US \$ per orang per hari, sedangkan jumlah pengusaha mikro menurut BPS (2007) adalah 95 % dari jumlah UMKM, atau pada akhir tahun 2007 diperkirakan mencapai 47.426.562 unit usaha. Dari aspek keuangan keluarga mungkin kelompok ini terbantu dengan adanya berbagai program yang dikeluarkan oleh pemerintah antara lain Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program beras untuk orang miskin (Raskin), Program asuransi kesehatan untuk keluarga miskin (Askeskin).

Program kredit usaha rakyat (KUR) dan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri).

4.1. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program ini adalah ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat miskin yang diperkirakan jumlahnya mencapai 19,1 juta kepala keluarga. Dalam kelompok masyarakat miskin tersebut tentunya ada mereka yang tergolong pengusaha mikro. Program ini memang dapat sedikit membantu kesulitan kelompok miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup, tetapi dengan melihat jumlah uang yang diberikan relatif sangat kecil (Rp 100.000) per orang per bulan, nampaknya mustahil dana tersebut dapat mengatasi masalah kemiskinan dan atau mengembalikan skala usaha serta pendapatan UMKM. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program yang bersifat tanggap darurat atau pemberian ikan untuk rakyat ini tidak dapat membantu mengatasi masalah kesulitan pengembangan usaha dikalangan UMKM.

4.2. Program Beras untuk orang miskin (Raskin)

Sama seperti program BLT, program beras untuk orang miskin atau program raskin juga merupakan program tanggap darurat yang bersifat pemberian ikan untuk orang miskin dan perannya hanya sebatas mengurangi beban kebutuhan bahan konsumsi untuk mereka. Program ini tidak akan banyak berdampak terhadap kelompok orang miskin yang UMKM terutama pengusaha kecil dan pengusaha menengah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang bertambah banyak sebagai akibat dari

kenaikan harga BBM. Demikian juga program ini sulit untuk dapat dikatakan bisa menjadi solusi untuk mempertahankan usaha dari kelompok mikro karena bantuan yang diberikan adalah dalam bentuk subsidi barang konsumsi yang memang mereka butuhkan untuk mempertahankan hidup dan dalam waktu singkat akan habis terpakai.

4.3. Asuransi kesehatan keluarga Miskin (Askeskin).

Program ketiga ini lebih tidak memungkinkan untuk membantu kelompok miskin yang UMKM dalam menghadapi permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kenaikan harga BBM. Program Askeskin hanya diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan atau mereka yang menderita sakit, jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam upaya menghadapi masalah menurunnya kegiatan usaha UMKM.

4.4. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Program ini nampaknya sangat ideal untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi oleh kalangan UMKM, tetapi dengan memperhatikan pelaksanaan program tersebut selama satu tahun pelaksanaannya, berbagai pihak masih merasa pesimis akan keefektifan dari program tersebut.

Rasa pesimis dari banyak kalangan cukup beralasan antara lain dengan memperhatikan:

a. Skala Program KUR

Diketahui bahwa skala program KUR relatif masih sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan modal usaha dari kalangan UMKM. Dapat dikemukakan disini bahwa jumlah UMKM per akhir tahun 2007 sudah mencapai 49 juta unit di mana jumlah pengusaha mikro diperkirakan mencapai 98 % dari jumlah UMKM atau lebih kurang 48 juta unit usaha. Hasil penelitian Deputi Bidang pengkajian sumberdaya UKM dan koperasi tahun 2006 menyimpulkan bahwa per usaha mikro dibutuhkan tambahan modal sebesar Rp, 3,8 juta sehingga kebutuhan kredit dari kelompok ini saja mencapai Rp 182 triliun. Alokasi penjaminan dari pemerintah sebesar 1,4 triliun dari harapan penyaluran sebesar 10 kali ($GR = 10$) maka total dana yang bisa dipinjamkan oleh perbankan baru sebesar Rp 14 triliun atau 7,67 % dari kebutuhan UMKM. Pertanyaannya bagaimana dengan kelompok UMKM yang belum mendapat pinjaman dari program tersebut, sedangkan diketahui bahwa sampai dengan akhir bulan April 2008, jumlah KUR yang disalurkan baru sebesar Rp 6,2 triliun.

- b. Prosedur dan persyaratan kredit
 - 1). Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit umum yang resikonya 10 % dijamin oleh pemerintah. Sharing jaminan 10 % dari pemerintah ini nampaknya cukup riskan bagi bank umum, karena *Non Performance Loan* (NPL) dari kredit-kredit program sebelumnya seperti KUR relatif cukup tinggi. Kondisi dapat menimbulkan berbagai permasalahan baik yang bersumber dari kalangan UMKM maupun Bank pelaksana. Dari kalangan UMKM bukan tidak mungkin muncul para afonturir yang ingin memanfaatkan pinjaman tersebut, sedangkan dari perbankan bukan tidak mungkin Bank akan memperketat persyaratan kredit sehingga mempersulit UMKM dalam meminjam.
 - 2). Pagu kredit relatif tinggi
Pagu kredit yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 500 juta pernasabah relatif sangat tinggi. Memang dalam pelaksanaannya pagu kredit terus diturunkan dan pada akhir bulai April 2008 rata-rata kredit per nasabah mencapai Rp 5,62. Dengan rata-rata pemberian kredit sebesar itu dan penyaluran kredit sebesar Rp 6,2 triliun maka jumlah UMKM yang bisa dilayani oleh program KUR baru sebanyak 11.032 orang. Dengan demikian program KUR baru dapat menjangkau 0.022 % dari jumlah UMKM yang ada di Indonesia . Dengan perkataan ini belum menjadi solusi yang efektif untuk memberdayakan UMKM.
- c. Komitmen pelaksana dalam mendukung pemberdayaan UMKM
Dari kedua poin di atas diketahui bahwa program KUR masih banyak me-nyimpan permasalahan dalam upaya pemberdayaan UMKM. Permasalahan tersebut nampaknya hanya dapat terselesaikan dengan baik jika ada komitmen yang sama di antara para pelaksana program. Kesamaan komitmen akan dapat dicapai jika semua unsur yang terlibat berpegang pada satu visi yaitu membangun sistem prekonomian yang berpihak pada rakyat banyak. Visi yang demikian seharusnya dapat dibentuk mengingat sebagian besar unsur pelaksana adalah unsur-unsur yang selama ini banyak terlibat dalam program-program pemberdayaan UMKM seperti bank-bank BUMN.

4.5. Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri)

Sama seperti program KUR, program PNPM-mandiri lebih mengutamakan pengembangan usaha masyarakat. Program yang dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) ini mirip dengan program bantuan perkuatan dalam bentuk

pinjaman (perkreditan) yang dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2008 Program ini akan menyalurkan bantuan pinjaman sebesar Rp 19 triliun. Jumlah pagu pinjaman tersebut memang relatif cukup besar, tetapi yang menjadi kekhawatiran dari banyak pihak adalah bahwa program belum memiliki kelembagaan yang dirancang sesuai dengan tujuan program. Disamping kekhawatiran tersebut dalam banyak aspek program ini masih banyak menimbulkan pertanyaan antara lain: a) Sejauhmana kompetensi Menko Kesra dalam kegiatan perekonomian masyarakat; b) Apakah instansi-instansi yang berada di bidang oleh Menko Kesra di tingkat daerah memiliki sarana dan SDM yang layak untuk memberikan arahan di bidang ekonomi dan; c) Apakah dana yang dialokasikan dalam bentuk hibah tersebut akan dapat mendorong kelompok sasaran untuk membangun usaha-usaha ekonomi. Semua permasalahan ini nampak masih sukar untuk dijawab karena program tersebut belum dilaksanakan dan Kantor Menko Kesra sendiri belum mengeluarkan indikator keberhasilan dari program tersebut.

V. Penutup

BPS tahun 2007 menginformasikan bahwa untuk pembelian BBM usaha mikro memerlukan dana sebesar Rp 634.250 per bulan atau Rp 7.611.000 per tahun. Dengan demikian kenaikan harga BBM sebesar 28,7 % akan meningkatkan pengeluaran usaha mikro sebesar Rp 103.596.542.690.634 atau Rp 103,596 triliun. Seandainya dana tersebut dapat dikembalikan kepada UMKM melalui program-program perkuatan, maka akan sangat menolong percepatan pemberdayaan UMKM. Dampak dari pengalihan subsidi BBM untuk program-program perkuatan UMKM juga tidak hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan konsumsi bagi UMKM, karena kegiatan usaha UMKM dan koperasi sebagai kelompok produktif, dapat berdampak luas kepada pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, penyerapan tenaga kerja dan lain-lain.

Hasil kajian Kementerian Negara Koperasi dan UKM 2006 menginformasikan bahwa dengan adanya bantuan perkuatan sebesar Rp 3,794 juta, Omset usaha mikro dan usaha kecil (UMKM) meningkat dari rata-rata Rp 44,429 juta, menjadi Rp 53,489 juta, atau rata rata bertambah sebesar Rp 9,059 juta atau 20,91% per tahun. Laba UMKM meningkat dari rata-rata Rp 10,495 juta, menjadi Rp 13,436 juta per tahun, atau bertambah sebesar Rp 2.941 juta (27,68 %). Dengan jumlah pendapatan sebesar ini, tanpa adanya pendapatan dari sumber lainnya dengan asumsi UMK memiliki tanggungan sebanyak 4 orang, maka dengan standar Bank Dunia (2 dollar per orang per hari) mereka masih tergolong kelompok miskin. Pendapatan minimal standar Bank Dunia

bagi keluarga dengan 4 tanggungan lebih kurang 2.880 Dolar AS per tahun atau Rp 25,92 juta. Dari data ini dapat disimulasikan berapa dana yang diperlukan untuk memberdayakan UMK dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan adalah sebesar Rp 182 triliun.

Dengan memperhatikan keperluan dana untuk memberdayakan UMKM tersebut di atas dan jumlah subsidi yang dapat dihemat setelah kenaikan harga BBM 28,7 % atau sebesar Rp 74,62 triliun, maka bukan tidak mungkin pemerintah seharusnya dapat mempeluas program bantuan perkuatan sampai mencapai 20 % dari jumlah UMKM. Untuk mampu memberdayakan 20 % dari jumlah UMKM tersebut, berdasarkan hasil temuan Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKK hanya diperlukan dana sebesar Rp 45,5 triliun atau dengan 4 kali perguliran, semua UMKM dapat merasakan bantuan pinjaman dari pemerintah. Kalkulasi di atas memang masih berupa perhitungan di atas kertas, namun optimisme keberhasilan program perkuatan nampaknya masih cukup besar, sekiranya program tersebut dilaksanakan dengan melibatkan koperasi yang nota bene koperasi tersebar di seluruh wilayah RI dan sudah berpengalaman dalam mendukung program-program pembangunan UKM sejak dari masa orde baru

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, (1995). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil*. Ditjen Pembinaan Koperasi Perkotaan. Jakarta.
- Anonimous, (2003). *Grand Strategi Pengembangan Sentra UKM*. Kementerian Koperasi dan UKM RI, Jakarta.
- Anonimous, (2000). Center for Economic and Social Studies. 2000. *Analisis Kebutuhan Pengembangan Sistem Pembiayaan Ekspor Bagi Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Pasar Luar Negeri*. Laporan Penelitian. Didukung oleh The Asia Foundation dan Swisscontact.
- Anonimous, (2001). *Policy Reform for Increasing Small and Medium Enterprise Growth. Study Report*. Support by The Asia Foundation and PEG-USAID.
- Anonimous, (2003). *Medium Enterprise Dynamics : The Barriers Constraining on The Development of Medium-Size Enterprises*. Study Report. Supported by The Asia Foundation. Berry, Sandee and Rodriguez. 2001. *Small and Medium Enterprise Dynamics In Indonesia*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol.37, No.3, 2001.

- Anonimous, (2007). *Prospek dan Kemanfaatannya dalam upaya pemberdayaan UMKM*. Deputi Bidang Pengkajian Koperasi dan UKM Kementerian Negara Koperasi dan UMK
- Anonimous, (2008). *Jawaban Dengar pendapat Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan Komisi 6 DPR tanggal 19 Mei 2008*. Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Jakarta
- Hasibuan, (2001). *Kajian Manfaat dan Permasalahan Kredit Bersubsidi untuk UMKM*. (Thesis S2), Bidang keahlian Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Desa Fakultas Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Manggara Tambunan, (2004). *Melangkah Ke Depan Bersama UKM*. Makalah pada Debat Ekonomi ESEI 2004, Jakarta Convention Centre 15-16 September 2004.
- Wayan Suarja, A.R. dan Teuku Syarif, (2008). *Pemberdayaan UMKM di Bawah Bayang-Bayang Kenaikan Harga BBM*. Deputi Bidan Pengkajian Sumberdaya UKM dan Koperasi, Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Jakarta.